

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Sumatera Utara

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara merupakan perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional di wilayah Sumatera Utara. BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah instansi pemerintah yang mempunyai misi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pertanahan Nasional sebelumnya dikenal sebagai Kantor Agraria. Pembentukan Badan Pertanahan Nasional dimulai pada tahun 1960. Tahun itu adalah tahun diundangkannya Undang-Undang Dasar Pertanahan (UUPA) yang menjadi titik tolak reformasi UU Pertanahan Nasional.

Setelah pembentukan Badan Pertanahan Nasional, banyak perubahan telah terjadi dalam nama, kekuasaan, kebijakan, prosedur dan struktur organisasinya. Saat ini, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, fungsi dan tanggung jawab Penyelenggaraan Pertanahan Negara mengalami perubahan. Berubahnya Organisasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Hal ini didasari fakta bahwa lahan bukan hanya menjadi masalah agar-agar saja, yang penting terkait dengan pertanian. Pertanahan berkembang pesat menjadi

persoalan lintas sektoral yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan aspek pertahanan dan keamanan. Untuk markas besar Kementerian Dalam Negeri, tugas ini terlalu besar. Untuk menjalankan tugasnya di bawah otoritas yang seimbang, diperlukan instansi yang lebih tinggi yang langsung dikendalikan oleh presiden. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional didirikan, yang misinya adalah menjalankan tugas-tugas pemerintahan di departemen pertanahan negara, wilayah, dan sektoral.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara terdiri dari 25 (dua puluh lima) satuan kerja, yaitu 18 (delapan belas) wilayah dan 7 (tujuh) kota. Guna mendukung pengembangan berbagai kegiatan, termasuk pengabdian masyarakat sehari-hari dan proyek-proyek yang didanai APBN. Pada tahun 2019, Kanwil Sumut memiliki 895 SDM.

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara

Visi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara :

“Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.”

Misi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara :

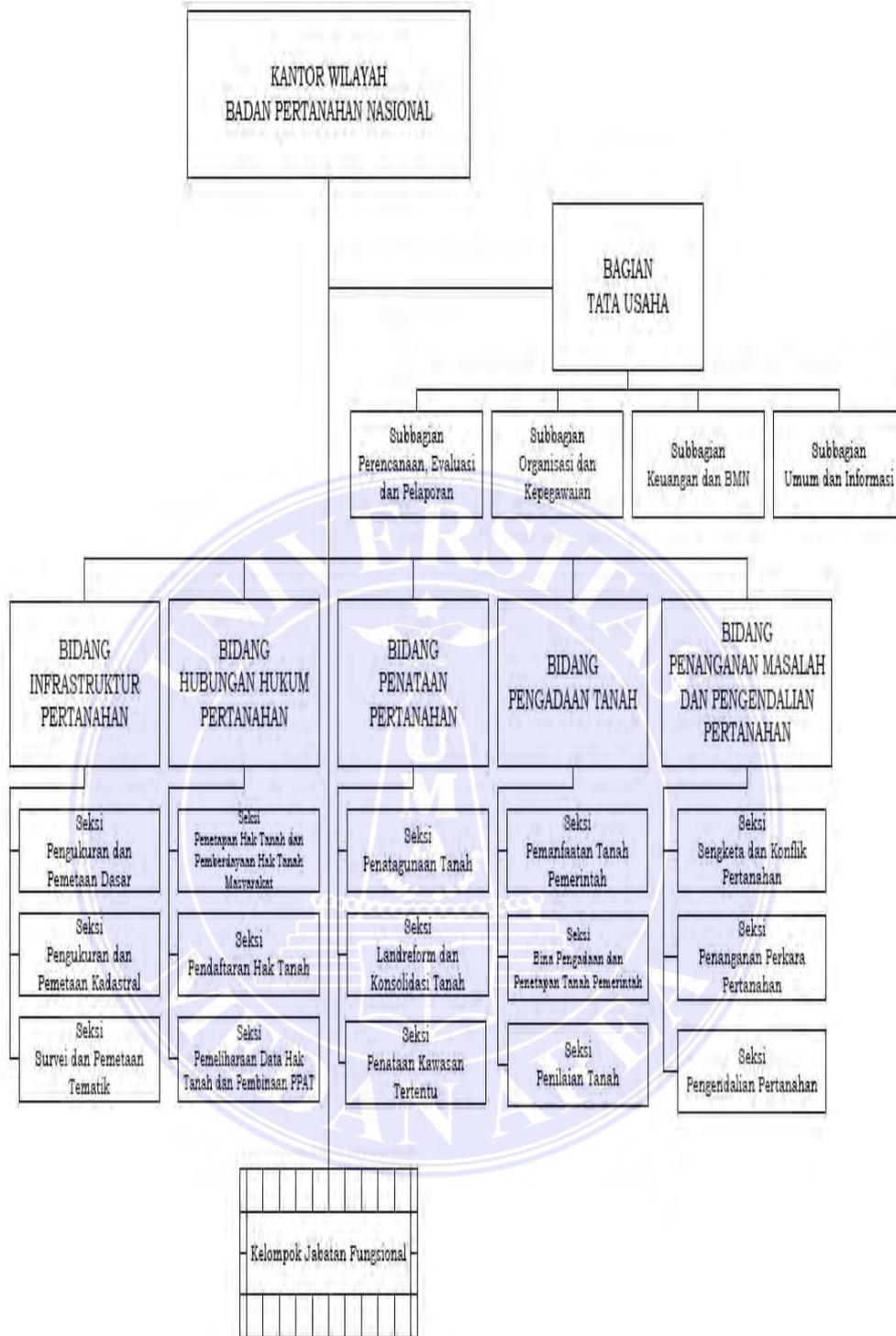
Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan sumber baru kemakmuran rakyat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta memperkuat ketahanan pangan.

2. Bersama-sama meningkatkan tatanan kehidupan terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih adil dan bermartabat.
3. Dengan menyelesaikan berbagai perselisihan, konflik dan kasus pertanahan di seluruh negeri, dan membangun dokumen hukum dan sistem pengelolaan lahan, untuk menghindari perselisihan, konflik dan kasus di masa depan, dan mencapai koeksistensi yang harmonis.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 38 Tahun 2017. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara terdiri dari beberapa bidang yang menangani masalah pertanahan yang dibagi dalam beberapa bagian untuk mempermudah tugas-tugas. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara dapat digambarkan pada gambar dibawah ini :



Sumber : Website Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Adapun tugas dan fungsi masing – masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha

Tugas Bagian Tata Usaha adalah melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kanwil.

Saat melakukan tugas yang disebutkan di bagian tata usaha melakukan fungsi berikut:

- a. Rencana pelaksanaan, penyusunan dan laporan rencana dan anggaran;
- b. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana strategis lahan;
- c. Melaksanakan urusan organisasi, manajemen, analisis pekerjaan dan manajemen personalia;
- d. Koordinasi dan promosi reformasi birokrasi di kantor wilayah dan kantor pertanahan;
- e. Pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan milik negara;
- f. Pengadaan administrasi, rumah tangga, pramutamu, peralatan dan layanan.

2. Bidang Infrastruktur Pertanahan

Tugas departemen bidang infrastruktur pertanahan adalah mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan survei dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan kadaster, serta survei dan pemetaan tematik. Bidang Infrastruktur Tanah menjalankan fungsi-fungsi berikut

- a. Pelaksanaan Menerapkan pengukuran dan pemetaan baseline;
- b. Mengukur batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
- c. Menyebarkan, mengoordinasikan, dan melatih teknisi, surveyor, dan personel survei dan pemetaan tematik di biro pertanahan di wilayahnya;

- d. Menerapkan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis dan teknologi survei dan pemetaan;
- e. Mempertahankan kerangka kadaster nasional dasar di wilayahnya;
- f. Pelaksanaan, koordinasi dan pengelolaan database geospasial berbasis lahan, dan komputerisasi kegiatan pertanahan berdasarkan data spasial;

3. Bidang Hubungan Hukum Pertanahan

Tugas bidang hubungan hukum pertanahan adalah mengkoordinasikan, memajukan dan melaksanakan penetapan hak atas tanah dan pemberian hak atas tanah masyarakat, pendaftaran hak atas tanah, dan pemeliharaan data hak atas tanah dan pemajuan PPAT. Bidang hubungan hukum pertanahan menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Ketentuan perluasan dan rekonstruksi hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta ketentuan hak ruang dan hak publik;
- b. Menyusun bahan-bahan untuk penerbitan izin dan penetapan hak atas tanah bagi kelompok sosial / agama, serta pengukuhan tanah wakaf, tanah yang sebelumnya dimiliki Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
- c. Mempersiapkan bahan penunjukan badan hukum tertentu dengan harta;
- d. Hitung dan konfirmasi hak atas tanah dan ruang hak individu dan badan hukum swasta;
- e. Menerapkan kekuasaan untuk memberikan hak atas tanah masyarakat;
- f. Dalam rangka pemberian hak atas tanah masyarakat, mempersiapkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat;

4. Bidang Penataan Pertanahan

Bidang Penataan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, dan konsolidasi tanah, serta penataan kawasan tertentu. Bidang Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menghimpun inventarisasi lahan, menentukan penggunaan dan penggunaan lahan, perhitungan penggunaan lahan, pedoman dan masalah
- b. Review teknologi lahan dan manajemen penggunaan lahan, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan lahan, manajemen database dan sistem informasi geografis;
- c. Menerapkan inventarisasi dan pengelolaan database data lahan potensial dan berkelanjutan untuk pangan dan pertanian;
- d. Melaksanakan pengelolaan daftar dan database tujuan land reform, dan membuat rekomendasi untuk mendefinisikan / menegaskan tujuan land reform,
- e. Menghapus tanah dari tujuan reformasi tanah, mengambil tanah sebagai tujuan reformasi tanah, dan memberi kompensasi tanah sebagai tujuan reformasi tanah;
- f. Menerapkan redistribusi tanah dan pembagian tanah;

5. Bidang Pengadaan Tanah

Bidang Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah, bina pengadaan dan penetapan tanah pemerintah, serta penilaian tanah. Bidang Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pemberian izin kerja sama penggunaan tanah pemerintah, perpanjangan izin kerja sama penggunaan tanah pemerintah, dan memberikan saran untuk pendaftaran dan penghapusan transisi.
- b. Tanah pemerintah dan memberikan saran untuk mengontrol pelanggaran perjanjian kerjasama penggunaan tanah pemerintah;
- c. Merumuskan rencana dan persiapan pengadaan tanah, melaksanakan pengadaan tanah pemerintah, dan menyampaikan hasil pengadaan tanah;
- d. Dalam penggunaan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah, melaksanakan peraturan hak atas tanah, izin pengalihan hak atau izin pelepasan hak, dan kerja sama;
- e. Melakukan penilaian tanah, petak dan properti;
- f. Membeli, memutakhirkan, dan bekerja sama untuk membuat peta wilayah wilayah / kota nilai tanah, peta wilayah wilayah nilai ekonomi dan potensi sumber daya pertanian;

6. Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penanganan sengketa dan konflik pertanahan, penanganan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan. Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menerapkan saran pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa / konflik tanah, serta menganalisis dan mempersiapkan pembatalan hak atas tanah;

- b. Menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan, menganalisis dan mempersiapkan proposal pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil mediasi;
- c. Menerapkan kontrol dan pemantauan penggunaan lahan;
- d. Melakukan penelitian data dan menyiapkan saran dan rekomendasi untuk penguasaan dan penggunaan lahan terlantar; dan
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan dan pengendalian masalah pertanahan.

4.1.4 Logo dan Makna Logo



Gambar 4.2 Logo Badan Pertanahan Nasional RI

Arti lambang-lambang yang terdapat pada logo :

1. 4 butir padi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Memaknai atau melambangkan 4 tujuan Penataan Pertanahan yang akan dan telah dilakukan Badan Pertanahan Nasional yaitu kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.

2. Gambar lingkaran bumi melambangkan sumber penghidupan manusia. Melambangkan wadah atau area untuk berkarya bagi Badan Pertanahan Nasional yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara.
3. Gambar sumbu melambangkan poros keseimbangan. 3 garis lintang dan 3 garis bujur emaknai atau melambangkan pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang mandasari lahirnya Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
4. Gambar 11 bidang grafis bumi memaknai atau melambangkan 11 agenda pertanahan yang akan dan telah dilakukan Badan Pertanahan Nasional. Bidang pada sisi sebelah kiri melambangkan bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja Badan Pertanahan Nasional.
5. Warna coklat melambangkan bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dan teguh.
6. Warna kuning emas melambangkan kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran.
7. Warna abu-abu melambangkan kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 40 responden, dimana peneliti telah membagikan empat puluh (40) buah kuesioner kepada responden di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kota Medan. Namun, kuesioner yang kembali hanya sebanyak 38 buah kuisioner, sehingga seluruh kuesioner yang kembali akan dijadikan sampel.

Tabel 4.1
Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	40	100%
Kuesioner yang tidak kembali	2	5%
Kuesioner yang kembali	38	95%
Kuesioner yang dijadikan sampel	38	95%

Sumber : Data primer diolah, 2020

4.2.2 Analisis Deskriptif

4.2.2.1 Data Responden

Berdasarkan data pada kuesioner yang telah disebar oleh peneliti kepada tiga puluh delapan (38) responden, maka peneliti memperoleh data mengenai gambaran umum responden.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi (Orang)	%	
Jenis Kelamin	Laki – Laki	22	58%
	Perempuan	16	42%
Usia	31 – 40	21	55%
	41 -50	13	34%
	>50	4	11%
Pendidikan Terakhir	D3	3	8%
	S1	19	50%
	S2	16	42%

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 58% dan jumlah responden berjenis kelamin perempuan 42%. Kemudian diketahui bahwa mayoritas responden berusia antara 31- 40 tahun sebanyak 21 orang (55%), disusul responden yang berusia 41-50

tahun sebanyak 13 orang (34%) dan responden berusia >50 tahun sebanyak 4 orang (11%). Sebagian besar responden berlatar belakang pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 19 orang (50%), kemudian disusul oleh responden yang berlatar belakang pendidikan Magister (S2) sebanyak 16 orang (42%), dan responden yang berlatar belakang pendidikan Diploma (D3) sebanyak 3 orang (8%).

4.2.2.2 Analisis Deskriptif Variabel

Setelah mengetahui karakteristik dari responden, maka selanjutnya akan menampilkan hasil olahan data primer yang merupakan gambaran dari hasil penelitian berdasarkan jawaban responden. Variabel yang diteliti adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) terdiri dari 10 pernyataan, Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) terdiri dari 6 pernyataan, Aktivitas Pengendalian (X_3) terdiri dari 8 pernyataan dan Akuntabilitas Kinerja (Y) terdiri dari 6 item pernyataan. Berikut jawaban responden atas variabel X dan Y berdasarkan kuisioner yang terkumpul :

a. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1)

Tabel 4.3
Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1)

No Item	SS		S		N		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	15	39.5	20	52.6	3	7.9	0	0	0	0
2	2	5.3	16	42.1	13	34.2	7	18.4	0	0
3	5	13.2	18	47.4	12	31.6	0	0	3	7.9
4	7	18.4	15	39.5	16	42.1	0	0	0	0
5	3	7.9	23	60.5	12	31.6	0	0	0	0
6	5	13.2	16	42.1	10	26.3	7	18.4	0	0
7	8	21.1	19	50.0	8	21.1	0	0	3	7.9
8	6	15.8	21	55.3	8	21.1	3	7.9	0	0
9	4	10.5	26	68.4	8	21.1	0	0	0	0
10	12	31.6	22	57.9	4	10.5	0	0	0	0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa:

1. Pada kuesioner pernyataan satu dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, diketahui bahwa terdapat 15 responden (39.5%) sangat setuju bahwa sistem akuntansi keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kemudian 20 responden (52.6%) menjawab setuju, dan 3 responden (7.9%) menjawab netral.
2. Pada kuesioner pernyataan dua dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, diketahui bahwa terdapat 2 responden (5.3%) sangat setuju bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan dengan analisis transaksi atau identifikasi transaksi, kemudian 16 responden (42.1%) menjawab setuju, 13 responden (34.2%) menjawab netral, dan 7 responden (18.4%) menjawab tidak setuju.
3. Pada kuesioner pernyataan tiga dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, diketahui bahwa terdapat 5 responden (13.2%) sangat setuju bahwa dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan, kemudian 18 responden (47.4%) menjawab setuju, 12 responden (31.6%) menjawab netral, dan 3 responden (7.9%) menjawab sangat tidak setuju.
4. Pada kuesioner pernyataan empat dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, diketahui bahwa terdapat 7 responden (18.4 %) sangat setuju bahwa setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi, kemudian 15 responden (39.5 %) menjawab setuju, dan 16 responden (42.1 %) menjawab netral.
5. Pada kuesioner pernyataan lima dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, diketahui bahwa terdapat 3 responden (7.9%) sangat setuju

bahwa semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis, kemudian 23 responden (60.5%) menjawab setuju, dan 12 responden (31.6%) menjawab netral.

6. Pada kuesioner pernyataan enam dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, diketahui bahwa terdapat 5 responden (13.2%) sangat setuju bahwa dilakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi, kemudian 16 responden (42.1%) menjawab setuju, 10 responden (26.3%) menjawab netral, dan 7 responden (18.4%) menjawab tidak setuju.
7. Pada kuesioner pernyataan tujuh dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, diketahui bahwa terdapat 8 responden (21.1%) sangat setuju bahwa dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya, kemudian 19 responden (50%) menjawab setuju, 8 responden (21.1%) menjawab netral, dan 3 responden (7.9%) menjawab sangat tidak setuju.
8. Pada kuesioner pernyataan delapan dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, diketahui bahwa terdapat 6 responden (15.8%) sangat setuju bahwa sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan, kemudian 21 responden (55.3%) menjawab setuju, 8 responden (21.1%) menjawab netral, dan 3 responden (7.9%) menjawab tidak setuju.
9. Pada kuesioner pernyataan sembilan dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, diketahui bahwa terdapat 4 responden (10.5%) sangat setuju bahwa pembuatan laporan keuangan dilakukan

setiap periode akuntansi, kemudian 26 responden (68.4%) menjawab setuju, dan 8 responden (21.1%) menjawab netral.

10. Pada kuesioner pernyataan sepuluh dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, diketahui bahwa terdapat 12 responden (31.6%) sangat setuju bahwa pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik, kemudian 22 responden (57.9%) menjawab setuju, dan 4 responden (10.5%) menjawab netral.

b. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)

Tabel 4.4
Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran(X_2)

No Item	SS		S		N		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	9	23.7	26	68.4	3	7.9	0	0	0	0
2	8	21.1	25	65.8	4	10.5	1	2.6	0	0
3	2	5.3	29	76.3	7	18.4	0	0	0	0
4	6	15.8	25	65.8	7	18.4	0	0	0	0
5	8	21.1	26	68.4	4	10.5	0	0	0	0
6	8	21.1	22	57.9	7	18.4	1	2.6	0	0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa:

1. Pada kuesioner pernyataan satu dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, diketahui bahwa terdapat 9 responden (23.7%) sangat setuju bahwa ada kejelasan sasaran anggaran, kemudian 26 responden (68.4%) menjawab setuju, dan 3 responden (7.9%) menjawab netral,
2. Pada kuesioner pernyataan dua dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, diketahui bahwa terdapat 8 responden (21.1%) sangat setuju bahwa ada spesifikasi sasaran anggaran, kemudian 25 responden (65.8%) menjawab setuju,

- 4 responden (10.5%) menjawab netral, dan 1 responden (2.6%) menjawab tidak setuju.
3. Pada kuesioner pernyataan tiga dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, diketahui bahwa terdapat 2 responden (5.3%) sangat setuju bahwa responden dapat mengetahui tingkat kepentingan sasaran anggaran pada setiap program/kegiatan, kemudian 29 responden (76.3%) menjawab setuju, dan 7 responden (18.4%) menjawab netral
 4. Pada kuesioner pernyataan empat dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, diketahui bahwa terdapat 6 responden (15.8 %) sangat setuju bahwa dapat mengetahui secara jelas output dan outcome yang harus dicapai pada setiap program dan kegiatan, kemudian 25 responden (65.8 %) menjawab setuju, dan 7 responden (18.4 %) menjawab netral.
 5. Pada kuesioner pernyataan lima dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, diketahui bahwa terdapat 8 responden (21.1%) sangat setuju bahwa anggaran yang dibuat telah mempertimbangkan skala prioritas, kemudian 26 responden (68.4%) menjawab setuju, dan 4 responden (10.5%) menjawab netral.
 6. Pada kuesioner pernyataan enam dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, diketahui bahwa terdapat 8 responden (21.1%) sangat setuju bahwa indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur , kemudian 22 responden (57.9%) menjawab setuju, 7 responden (18.4%) menjawab netral, dan 1 responden (2.6%) menjawab tidak setuju.

c. Variabel Aktivitas Pengendalian (X_3)

Tabel 4.5
Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Aktivitas Pengendalian (X_3)

No Item	SS		S		N		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	5	13.2	27	71.1	4	10.5	2	5.3	0	0
2	4	10.5	21	55.3	11	28.9	2	5.3	0	0
3	7	18.4	17	44.7	14	36.8	0	0	0	0
4	7	18.4	20	52.6	11	28.9	0	0	0	0
5	4	10.5	20	52.6	12	31.6	1	2.6	1	2.6
6	4	10.5	23	60.5	9	23.7	2	5.3	0	0
7	2	5.3	24	63.2	12	31.6	0	0	0	0
8	6	15.8	17	44.7	14	36.8	1	2.6	0	0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa:

1. Pada kuesioner pernyataan satu dari variabel Aktivitas Pengendalian, diketahui bahwa terdapat 5 responden (13.2%) sangat setuju bahwa pemilihan prinsip akuntansi dan pengembangan estimasi akuntansi konsisten dengan tujuan dan pelaporan yang wajar, kemudian 27 responden (71.1%) menjawab setuju, 4 responden (10.5%) menjawab netral dan 2 responden (5.3%) menjawab tidak setuju.
2. Pada kuesioner pernyataan dua dari variabel Aktivitas Pengendalian, diketahui bahwa terdapat 4 responden (10.5%) sangat setuju bahwa kebijakan dan prosedur personel yang ada menghasilkan perekrutan atau pengembangan orang yang berkompeten dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk mendukung struktur pengendalian intern yang efektif, kemudian 21 responden (55.3%) menjawab setuju, 11 responden (28.9%) menjawab netral, dan 2 responden (5.3%) menjawab tidak setuju.

3. Pada kuesioner pernyataan tiga dari variabel Aktivitas Pengendalian, diketahui bahwa terdapat 7 responden (18.4%) sangat setuju bahwa personel harus memahami tugas prosedur dalam pekerjaan mereka masing-masing, kemudian 17 responden (44.7%) menjawab setuju, dan 14 responden (36.8%) menjawab netral
4. Pada kuesioner pernyataan empat dari variabel Aktivitas Pengendalian, diketahui bahwa terdapat 7 responden (18.4%) sangat setuju bahwa setiap transaksi pembelanjaan terdapat nota pembayaran yang disetujui dengan dokumen pendukung untuk setiap cek yang disiapkan, kemudian 20 responden (52.6 %) menjawab setuju, dan 11 responden (28.9%) menjawab netral.
5. Pada kuesioner pernyataan lima dari variabel Aktivitas Pengendalian, diketahui bahwa terdapat 4 responden (10.5%) sangat setuju bahwa hanya personel yang mempunyai orientasi yang diizinkan untuk menandatangani cek, kemudian 20 responden (52.6 %) menjawab setuju, 12 responden (31.6%) menjawab netral. 1 responden (2.6%) menjawab tidak setuju, dan 1 responden (2.6%) menjawab sangat tidak setuju
6. Pada kuesioner pernyataan enam dari variabel Aktivitas Pengendalian, diketahui bahwa terdapat 4 responden (10.5%) sangat setuju bahwa penandatanganan cek dengan memeriksa kesesuaian dari detil cek nota pembayaran sebelum menandatangani, kemudian 23 responden (60.5%) menjawab setuju, 9 responden (23.7%) menjawab netral, dan 2 responden (5.3%) menjawab tidak setuju.

7. Pada kuesioner pernyataan tujuh dari variabel Aktivitas Pengendalian, diketahui bahwa terdapat 2 responden (5.3%) sangat setuju bahwa terdapat pemisahan tugas, kemudian 24 responden (63.2%) menjawab setuju, dan 12 responden (31.6%) menjawab netral.
8. Pada kuesioner pernyataan delapan dari variabel Aktivitas Pengendalian, diketahui bahwa terdapat 6 responden (15.8%) sangat setuju bahwa pengecekan independen atas kesesuaian iktisar cek harian yang diterbitkan dengan jurnal untuk pengeluaran kas, kemudian 17 responden (44.7%) menjawab setuju, 14 responden (36.8%) menjawab netral, dan 1 responden (2.6%) menjawab tidak setuju.

d. Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)

No Item	SS		S		N		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	5	13.2	30	78.9	3	7.9	0	0	0	0
2	2	5.3	24	63.2	12	31.6	0	0	0	0
3	4	10.5	19	50.0	15	39.5	0	0	0	0
4	4	10.5	18	47.4	15	39.5	1	2.6	0	0
5	6	15.8	20	52.6	11	28.9	1	2.6	0	0
6	8	21.1	21	55.3	9	23.7	0	0	0	0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa:

1. Pada kuesioner pernyataan satu dari variabel Akuntabilitas Kinerja, diketahui bahwa terdapat 5 responden (13.2%) sangat setuju bahwa adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan, kemudian 30 responden (78.9%) menjawab setuju, dan 3 responden (7.9%) menjawab netral.

2. Pada kuesioner pernyataan dua dari variabel Akuntabilitas Kinerja, diketahui bahwa terdapat 2 responden (5.3%) sangat setuju bahwa melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan, kemudian 24 responden (63.2%) menjawab setuju, dan 12 responden (31.6%) menjawab netral.
3. Pada kuesioner pernyataan tiga dari variabel Akuntabilitas Kinerja, diketahui bahwa terdapat 4 responden (10.5%) sangat setuju bahwa melakukan pengecekan terhadap jalannya program, kemudian 19 responden (50%) menjawab setuju, dan 15 responden (39.5%) menjawab netral
4. Pada kuesioner pernyataan empat dari variabel Akuntabilitas Kinerja, diketahui bahwa terdapat 4 responden (10.5%) sangat setuju bahwa kurangnya insentif berupa imbalan atau pengakuan positif, tidak menghambat penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan di organisasi, kemudian 18 responden (47.4 %) menjawab setuju, 15 responden (39.5%) menjawab netral dan 1 responden (2.6%) menjawab tidak setuju.
5. Pada kuesioner pernyataan lima dari variabel Akuntabilitas Kinerja, diketahui bahwa terdapat 6 responden (15.8%) sangat setuju bahwa pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan (accountable) hasil dari suatu program/kegiatan/proyek yang telah dilakukan, kemudian 20 responden (52.6%) menjawab setuju, 11 responden (28.9%) menjawab netral dan 1 responden (2.6%) menjawab tidak setuju.
6. Pada kuesioner pernyataan enam dari variabel Akuntabilitas Kinerja, diketahui bahwa terdapat 8 responden (21.1%) sangat setuju bahwa pimpinan dan pegawai selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu

program/kegiatan/proyek, kemudian 21 responden (55.3%) menjawab setuju, dan 9 responden (23.7%) menjawab netral.

4.2.3 Analisis Statistik

4.2.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji Validitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kevalidan atau kebenaran dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden di luar dari responden penelitian yang berjumlah 30 orang untuk uji validitas dan reliabilitas. Nilai r_{tabel} dengan ketentuan $df = \text{jumlah responden}$ yaitu 30 dan tingkat signifikansi sebesar 5% maka angka yang diperoleh = 0.361.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X1)			
X1_1	0.592	0.361	Valid
X1_2	0.747	0.361	Valid
X1_3	0.758	0.361	Valid
X1_4	0.824	0.361	Valid
X1_5	0.788	0.361	Valid
X1_6	0.617	0.361	Valid
X1_7	0.677	0.361	Valid
X1_8	0.766	0.361	Valid
X1_9	0.757	0.361	Valid
X1_10	0.688	0.361	Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)			
X2_1	0.651	0.361	Valid
X2_2	0.648	0.361	Valid
X2_3	0.814	0.361	Valid
X2_4	0.782	0.361	Valid
X2_5	0.760	0.361	Valid
X2_6	0.845	0.361	Valid

Aktivitas Pengendalian (X3)			
X3_1	0.553	0.361	Valid
X3_2	0.662	0.361	Valid
X3_3	0.639	0.361	Valid
X3_4	0.801	0.361	Valid
X3_5	0.700	0.361	Valid
X3_6	0.685	0.361	Valid
X3_7	0.730	0.361	Valid
X3_8	0.668	0.361	Valid
Akuntabilitas Kinerja (Y)			
Y_1	0.623	0.361	Valid
Y_2	0.742	0.361	Valid
Y_3	0.906	0.361	Valid
Y_4	0.867	0.361	Valid
Y_5	0.831	0.361	Valid
Y_6	0.757	0.361	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2020

Hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan kuesioner telah valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0.05 (5%). Dengan demikian, kuesioner dapat dilanjutkan pada tahap pengujian reliabilitas.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program *SPSS 22 Statistics for Windows*. Pengujian dilakukan dengan cara menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrument yang digunakan dengan ketentuan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 maka instrument dinyatakan reliabel.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas berdasarkan data yang telah diolah dengan bantuan program *SPSS Statistics 22 for Windows*:

Tabel 4.8
Reliabilitas Data

Variabel	Cronbach Alpha	Status
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	0.895 > 0.60	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	0.842 > 0.60	Reliabel
Aktivitas Pengendalian (X3)	0,832 > 0.60	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,880 > 0.60	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2020

Berdasarkan tabel diatas, semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Cronbach Alpha* variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) sebesar $0.895 > 0.60$, variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) $0.842 > 0.60$, variabel Aktivitas Pengendalian (X3) $0,832 > 0.60$, dan Akuntabilitas Kinerja (Y) $0,880 > 0.60$.

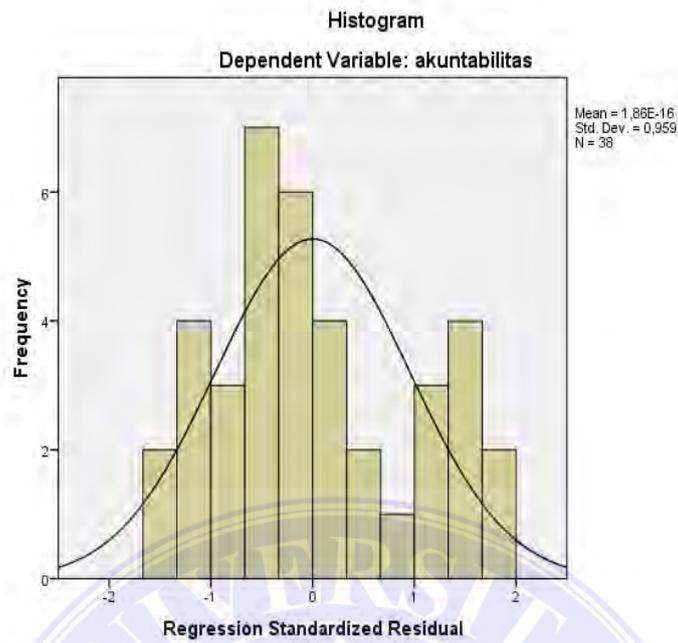
4.2.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.2.1 Uji Normalitas

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisis regresi, agar dapat diperkirakan yang tidak bias dan efisiensi maka dilakukan pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi, yang pertama adalah uji normalitas. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan pendekatan grafik dan pendekatan *Kolmogrov-Smirnov*.

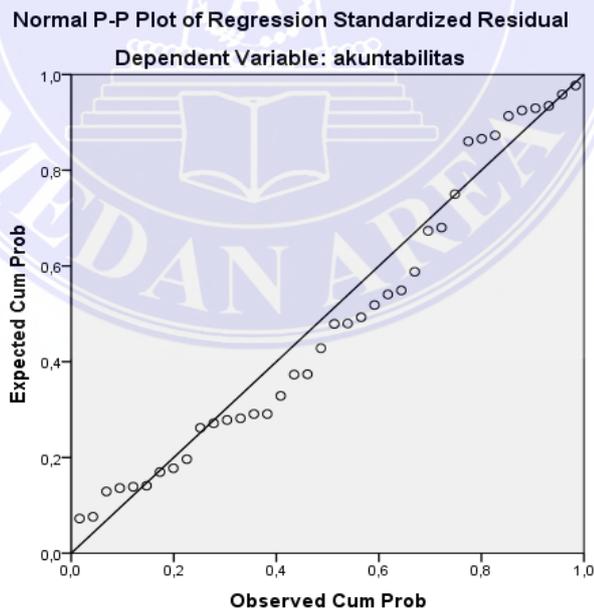
1. Pendekatan Grafik

Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik histogram dan grafik normal plot yang membandingkan antara dua observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2020

Gambar IV.3 Grafik Histogram Uji Normalitas



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2020

Gambar 4.4 Grafik Normal P-P Plot Uji Normalitas

Berdasarkan tampilan pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa hubungan dari Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Kinerja adalah berdistribusi normal, hal ini ditunjukkan oleh gambar grafik histogram yang tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Sedangkan pada Gambar 4.4 terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Pendekatan *Kolmogrov-Smirnov*

Uji normalitas dengan grafik bisa saja terlihat berdistribusi normal, padahal secara statistik tidak berdistribusi normal. Berikut ini pengujian normalitas yang berdasarkan dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) untuk memastikan apakah data benar berdistribusi normal.

Tabel 4.9
Uji *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,37650792
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,112
	Negative	-,107
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2020

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.9 diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0.200 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.2.3.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas, peneliti menggunakan program *SPSS 22 for Windows* dengan cara melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflating Factor (VIF)*.

Tabel 4.10
Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	(Constant)		
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,491	2,036
	Kejelasan Sasaran Anggaran	,773	1,294
	Aktivitas Pengendalian	,433	2,310

Dependent Variable: akuntabilitas

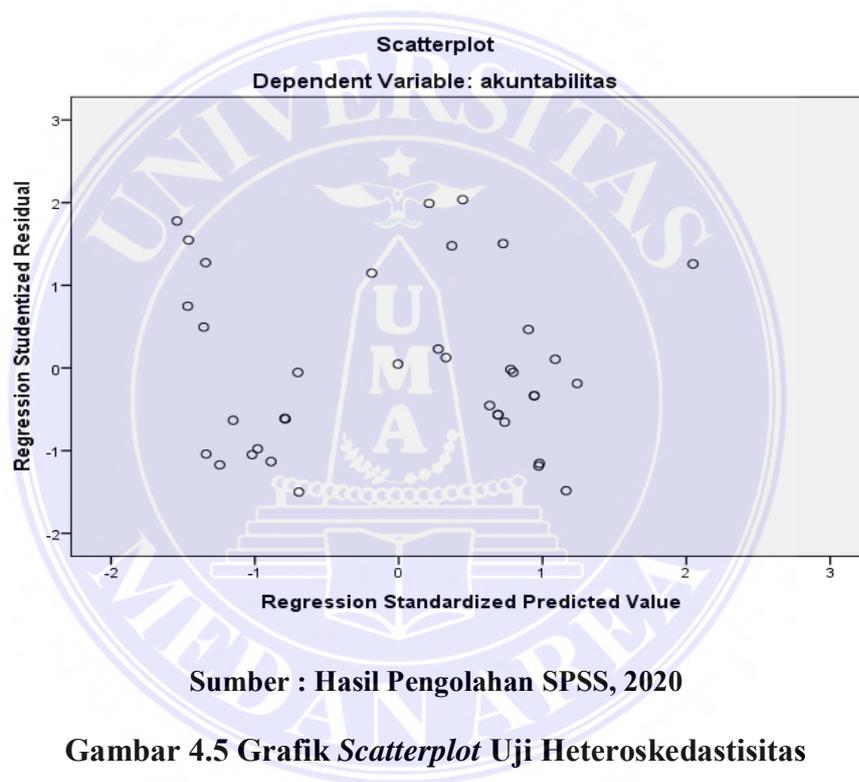
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil uji multikolinieritas dari masing-masing variabel independen menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) memiliki nilai tidak lebih dari 10, begitu juga apabila ditinjau dari nilai Tolerance memiliki nilai tidak kurang dari 0.10. Jadi dapat dikatakan bahwa masing-masing dari variabel independen terbebas dari multikolinieritas dalam model regresi ini.

4.2.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam sebuah model regresi. Untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, peneliti melakukan dengan cara melihat pola gambar *Scatterplot* dan uji *Glejser* menggunakan program *SPSS 22 for Windows*.

1. Pola *Scatterplot*



Gambar 4.5 Grafik *Scatterplot* Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.5 grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja berdasarkan variabel independen yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian.

2. Uji Glejser

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai Absolute residul. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 4.11
Hasil Uji Glejser

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,17	1,284		1,69	0,1
1 sistem keuangan	0,005	0,029	0,043	0,18	0,858
Kejelasan	0,001	0,058	0,005	0,025	0,98
Aktivitas	-0,042	0,042	-0,253	-0,994	0,327

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2020

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah 0.858, variabel Kejelasan Sasaran Anggaran adalah 0.98 dan variabel Aktivitas Pengendalian adalah 0.327. Nilai signifikansi kedua variabel independen tersebut lebih besar dari 0.05, artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.3.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai Pengaruh Penerapan

Sistem Akuntansi keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,342	2,363		,568	,574
Sistem akuntansi	,172	,053	,366	3,265	,002
Kejelasan	,234	,106	,197	2,206	,034
Aktivitas	,312	,078	,477	3,995	,000

a. Dependent Variable: akuntabilitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS (Februari 2020)

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 1.342 + 0.172X_1 + 0.234X_2 + 0.312X_3$$

$$\text{Akuntabilitas} = 1.342 + 0.172 \text{ Sistem} + 0.234 \text{ Kejelasan} + 0.312 \text{ Aktivitas}$$

Dari persamaan regresi tersebut di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 1.342 menyatakan bahwa jika nilai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian tidak ada atau nol, maka nilai Akuntabilitas Kinerja adalah sebesar 1.342.
- Koefisien Regresi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0.172 menunjukkan bahwa apabila Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah naik sebesar satu point, maka nilai Akuntabilitas Kinerja akan meningkat sebesar 0.172. Dengan asumsi variabel independen yang lain konstan (tetap).

- c. Koefisien Regresi Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 0.234 menunjukkan bahwa apabila Kejelasan Sasaran Anggaran naik sebesar satu point, maka Akuntabilitas Kinerja akan meningkat sebesar 0.234. Dengan asumsi variabel independen yang lain konstan (tetap).
- d. Koefisien Regresi Aktivitas Pengendalian sebesar 0.312 menunjukkan bahwa apabila Aktivitas Pengendalian naik sebesar satu point, maka Akuntabilitas Kinerja akan meningkat sebesar 0.312. Dengan asumsi variabel independen yang lain konstan (tetap).

4.2.3.4 Uji Hipotesis

4.2.3.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Tabel 4.13
Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1,342	2,363		,568	,574
	Sistem akuntansi	,172	,053	,366	3,265	,002
	Kejelasan	,234	,106	,197	2,206	,034
	Aktivitas	,312	,078	,477	3,995	,000

a. Dependent Variable: akuntabilitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa:

- a. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Nilai probabilitas thitung pada variabel Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah sebesar $0.002 < 0.05$ menunjukkan bahwa Penerapan Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Artinya, jika variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meningkat maka variabel Akuntabilitas Kinerja juga mengalami peningkatan. Atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka semakin bagus Akuntabilitas Kinerja.

b. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

Nilai probabilitas thitung pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar $0.034 < 0.05$ menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Artinya, jika variabel Kejelasan Sasaran Anggaran meningkat maka variabel Akuntabilitas Kinerja juga mengalami peningkatan. Atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat Kejelasan Sasaran Anggaran maka semakin bagus Akuntabilitas Kinerja.

c. Variabel Aktivitas Pengendalian (X3)

Nilai probabilitas thitung pada variabel Aktivitas Pengendalian sebesar $0.000 < 0.05$ menunjukkan bahwa Aktivitas Pengendalian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Artinya, jika variabel Aktivitas Pengendalian meningkat maka variabel Akuntabilitas Kinerja juga mengalami peningkatan. Atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat Aktivitas Pengendalian maka semakin bagus Akuntabilitas Kinerja.

4.2.3.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk melihat apakah variabel independen (X1,X2,X3) yaitu Penerapan Sistem Akuntansi keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu Akuntabilitas Kinerja. Pada penelitian ini

diketahui jumlah sampel (n) adalah 38 dan jumlah keseluruhan variabel (k) adalah 4, sehingga diperoleh:

$$1) \text{ df (pembilang) } = k-1 \longrightarrow \text{ df (pembilang) } = 4 - 1 = 3$$

$$2) \text{ df (penyebut) } = n-k \longrightarrow \text{ df (penyebut) } = 38 - 4 = 34$$

Maka didapat nilai untuk F_{tabel} pada tingkat $\alpha = 5\% = 2.88$.

Tabel 4.14
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	263,788	3	87,929	42,644	,000 ^b
	Residual	70,107	34	2,062		
	Total	333,895	37			

a. Dependent Variable: akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), aktivitas, kejelasan, sistem keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji program SPSS 22 for Windows pada Tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas F_{hitung} sebesar $0.000 < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.

4.2.3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi atau R Square (R^2) digunakan untuk memprediksi sekaligus melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen secara serentak atau simultan terhadap variabel dependen. Jika R^2 semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) adalah besar.

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,889 ^a	,790	,772	1,43595

a. Predictors: (Constant), aktivitas, kejelasan, sistem keuangan

b. Dependent Variable: akuntabilitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa *Adjusted R Square* sebesar 0.772 berarti variabel Akuntabilitas Kinerja dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Aktivitas Pengendalian sebesar 77.2%. Sedangkan sisanya sebesar 22.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti variabel Sistem Pelaporan dan Transparansi Publik.

4.2.4 Hasil Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja. Dari hasil pengujian koefisien determinasi diketahui bahwa variabel Akuntabilitas Kinerja dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Aktivitas Pengendalian sebesar 77.2%. Sedangkan sisanya sebesar 22.8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,265 > 1.690$) dan nilai probabilitas t_{hitung} yaitu $0.002 > 0.05$ menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja. Nilai koefisien regresi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diperoleh sebesar 0.172, artinya jika nilai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meningkat 1 (satu) poin maka Akuntabilitas Kinerja akan meningkat sebesar 0.172 dan ini menyebabkan hubungan yang positif antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saifrizal (2019) yang meneliti Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif atas jawaban responden dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada butir pernyataan kedua yaitu setiap transaksi keuangan pada instansi ini dilakukan dengan analisis transaksi / identifikasi transaksi diketahui bahwa terdapat 18,4% responden tidak setuju, butir pernyataan ketiga pada instansi ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan terdapat 7,9% responden sangat tidak setuju, butir pernyataan keenam pada instansi ini dilakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi

terdapat 18,4% responden tidak setuju, dan butir pernyataan ketujuh Pada Instansi ini dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya terdapat 7,9% responden sangat tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara belum sepenuhnya diterapkan. Selain daripada itu, sebagian besar responden sudah menyetujui dengan pernyataan yang ditanyakan, yang mana mengungkapkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sudah cukup baik, hanya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kedepannya, seperti adanya pengidentifikasian dalam prosedur pencatatan.

2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.206 > 1.690$) dan nilai probabilitas t_{hitung} yaitu $0.034 > 0.05$ menunjukkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja. Nilai koefisien regresi Kejelasan Sasaran Anggaran diperoleh sebesar 0.234, artinya jika nilai Kejelasan Sasaran Anggaran meningkat 1 (satu) poin maka Akuntabilitas Kinerja akan meningkat sebesar 0.234 dan ini menyebabkan hubungan yang positif antara Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saifrizal (2019) yang meneliti Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas yang

menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif atas jawaban responden dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran pada butir pernyataan kedua adanya peningkatan proses pencapaian sasaran anggaran pada satuan kerja ini terdapat 2,6% responden tidak setuju dan butir pernyataan keenam sasaran anggaran penyelesaian konflik pertanahan mencapai target terdapat 7,9% responden tidak setuju, bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara belum sepenuhnya jelas dan memenuhi target. Selain daripada itu, sebagian besar responden sudah menyetujui dengan pernyataan yang ditanyakan, yang mana mengungkapkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran sudah cukup baik, hanya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan proses pencapaian sasaran anggaran kedepannya.

3. Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aktivitas Pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,995 > 1.690$) dan nilai probabilitas t_{hitung} yaitu $0.000 > 0.05$ menunjukkan bahwa variabel Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja. Nilai koefisien regresi Aktivitas Pengendalian diperoleh sebesar 0.312, artinya jika nilai Aktivitas Pengendalian meningkat 1 (satu) poin maka Akuntabilitas Kinerja akan meningkat sebesar 0.312 dan ini menyebabkan hubungan yang positif antara Aktivitas Pengendalian dengan Akuntabilitas Kinerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Soleha (2014) yang meneliti Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas yang menyatakan bahwa Aktivitas Pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif atas jawaban responden dari variabel Aktivitas Pengendalian pada butir pernyataan pertama Pemilihan prinsip akuntansi dan pengembangan estimasi akuntansi konsisten dengan tujuan dan pelaporan yang wajar, pernyataan kedua kebijakan dan prosedur personel yang ada menghasilkan perekrutan atau pengembangan orang yang berkompeten dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk mendukung struktur pengendalian intern yang efektif dan pernyataan keenam penandatanganan cek dengan memeriksa kesesuaian dari detil cek nota pembayaran sebelum menandatangani diketahui bahwa terdapat 5,3% responden tidak setuju dan butir pernyataan kelima hanya personel yang mempunyai orientasi yang diizinkan untuk menandatangani cek terdapat 2,6% responden sangat tidak setuju, bahwa Aktivitas Pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara belum sepenuhnya baik. Selain daripada itu, sebagian besar responden sudah menyetujui dengan pernyataan yang ditanyakan, yang mana mengungkapkan Aktivitas Pengendalian sudah cukup baik, hanya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kedepannya.